KONSEP KHILAFAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, POLITIK DAN HUKUM

Suhari

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia
suharyidris@yahoo.com

Abstract

The concept of the Caliphate, rooted in Islamic tradition, contains important principles that can be applied in the fields of modern politics and law. In a political context, the Caliph concept emphasizes leadership that is fair, transparent and accountable to society and God. This leadership is based on strong moral and ethical values, which aim to achieve prosperity and social justice. In the legal field, this concept encourages fair and equitable application of the law, as well as impartial law enforcement. The legal system based on the Caliphate concept also prioritizes the protection of human rights and individual freedoms, while maintaining the values and norms of society. The implementation of the Caliphate concept in modern politics and law can offer a holistic and balanced approach, capable of responding to contemporary challenges while still respecting traditional and religious values.

Keywords: Caliph, politics, law, leadership.

Abstrak

Konsep Khalifah, yang berakar pada tradisi Islam, mengandung prinsip-prinsip penting yang dapat diterapkan dalam bidang politik dan hukum modern. Dalam konteks politik, konsep Khalifah menekankan pada kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta Tuhan. Kepemimpinan ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Di bidang hukum, konsep ini mendorong penerapan hukum yang adil dan merata, serta penegakan hukum yang tidak memihak. Sistem hukum berdasarkan konsep Khalifah juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu, sambil tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Implementasi konsep Khalifah dalam politik dan hukum modern dapat menawarkan pendekatan yang holistik dan berimbang, yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer dengan tetap menghormati nilai-nilai tradisional dan religius.

Kata kunci: Khalifah, politik, hukum, kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Khilafah dalam pemikiran politik islam (*al-siyasah al-syar'iyah*) merupakan salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji, meskipun terjadi kontroversi di kalangan umat islam. Begitu juga tentang perbedaan pandangan pemisahan dan penyatuan antara negara dan agama yang menyebabkan terjadinya dua kelompok yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan, agama adalah politik (kekuasaan), sehingga wajib mendirikan negara atas dasar agama. Kedua, agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dua pemikiran yang berbeda tersebut dapat di jadikan akar permasalahan munculnya perbedaan pandangan tentang sistem kenegaraan islam dalam kelompok-kelompok umat islam (Mustafha, 2014).

Impilikasi dari pemahaman tentang pemisahan antara negara dan agama adalah agama tidak berhak mengurus negara, dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Agama dianggap sebagai urusan privat dan tidak ada kaitannya dengan negara. Hal ini bisa dilihat dari sejarah islam, dimasa suksesi kepemimpinan terutama dalam pemerintahan islama memiliki sejarah yang sangat panjang. Hal itu berawal dari sejak nabi meninggal dunia peralihan kepemimpinan kepada Abu Bakar melalui perdebatan yang panjang, namun tetap berjalan damai dan konstitusional.

Perdebatan di antara intelektual muslim tentang negara-agama mencapai puncaknya ketika Ali Abdul Raziq menulis tesis *al-islam wa usul al-hukm* yang dengan tegas menolak penyatuan agama dan negara atau negara khilafah. Itu sebabnya, slogan *islam din wa daulah* sering dipahami sebagai berikut : 1) Sistem pemerintahan dalam negara-islam merupakan inti dari ajaran islam. 2) Politik merupakan bagian dari islam, karenanya praktik berpolitik berarti praktik beragama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara agama dan politik. 3) Kewajiban mendirikan negara islam berdasarkan baik perundang-undangan maupun fiqh-nya; yakni penerapan syariat islam, dan 4) Dasar dari negara islam adalah manhaj islami dan sistem moral islam. Masalah politik, ekonomi, spil, militer, pidana dan perdata di atur jelas oleh islam. Seluruh aturan itu telah dipraktikan pada masa rasulullah, al-Khulafa al-Rasyidin dan pemerintah sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa islam merupakan suatu sistem bagi negara dan pemerintah serta untuk mengatur masyarakat, umat dan individu-individu (Muhammadiyah, 2016). Perbedaan pandangan tentang hubungan agama dan negara pada dasarnya terletak pada pemikiran bahwa agama menyatu dengan negara yang memiliki fungsi untuk mengatur negara dalam segala bidang. Atau dengan kata lain, agama adalah politik. Perbedaan sudut pandang ini kemudian berimplikasi kepada dua kutub besar. Pertama, pembentukan negara yang berazas islam (khilafah) dengan startegi resolusi jihad. Kedua, penolakan penerapan syariat islam dalam negara khilafah, sehingga muncul kelompok islam inklusif, eksklusif, fundamentalis dan liberalis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan library research yaitu dengan menelaah sumber bacaan yang ada hubungannya dengan kajian yang di bahas, serta dengan menggunakan studi dokumen hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan filsafat ilmu. Pengumpulan data di lakukan dengan menelusuri buku-buku bacaan, jurnal ilmiah yang terbit di *google scholar*, *digital library*, serta perpustakaan.

PEMBAHASAN

Khilafah adalah konsep pemerintahan Islam yang berlandaskan syariat. Istilah ini berasal dari kata "khalifah," yang berarti penerus atau wakil. Dalam konteks Islam, khilafah merujuk pada sistem kepemimpinan yang menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Dalam sejarah Islam, khilafah pernah diterapkan pada masa

Khalifah Rasyidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Makalah ini akan membahas aplikasi konsep khilafah dalam bidang politik dan hukum, serta relevansinya dalam konteks modern (Muhammad, 2004).

Konsep Khilafah dalam Bidang Politik

- a. Struktur Pemerintahan: a) Kepemimpinan Sentral: Khalifah adalah pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas penuh dalam urusan pemerintahan. Khalifah diangkat melalui proses syura (musyawarah) atau bai'at (sumpah setia). b) Konsultasi dan Musyawarah: Keputusan-keputusan penting diambil melalui konsultasi dengan para ulama dan ahli dalam bidang tertentu, mencerminkan prinsip syura yang dianjurkan dalam Islam. c) Wilayah dan Administrasi: Khilafah membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa provinsi atau wilayah yang dipimpin oleh gubernur (wali). Struktur ini mirip dengan sistem federal modern, dengan otonomi daerah yang tetap berada di bawah kendali pusat (Tahrir, 2006).
- b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: a) Keadilan Sosial: Khilafah menekankan pentingnya keadilan sosial, memastikan bahwa hak-hak semua warga negara, termasuk non-Muslim, dihormati dan dilindungi. b) Pembagian Kekayaan: Sistem ekonomi dalam khilafah bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil melalui mekanisme zakat, sedekah, dan larangan riba.
- c. Hubungan Internasional: a) Dakwah dan Jihad: Politik luar negeri khilafah mencakup dakwah (penyebaran Islam) dan jihad (perjuangan untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam) yang dilakukan dengan cara damai maupun perang bila diperlukan. b) Perjanjian dan Diplomasi: Khilafah juga terlibat dalam perjanjian dan diplomasi dengan negara-negara lain untuk menjaga stabilitas dan keamanan (Abdurrahman, 1998)

Konsep Khilafah dalam Bidang Hukum

- a. Sumber Hukum: a) Al-Qur'an dan Hadis: Hukum dalam khilafah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam. b) Ijtihad: Proses ijtihad atau penafsiran hukum oleh para ulama digunakan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Sistem Peradilan: a) Qadi (Hakim): Peradilan dalam khilafah dipimpin oleh qadi yang ditunjuk berdasarkan pengetahuan mereka tentang syariat. b) Pengadilan Syariat: Terdapat pengadilan syariah yang menangani berbagai kasus, mulai dari pidana, perdata, hingga masalah keluarga (Athahilah). c) Hisbah: Institusi hisbah bertugas untuk memastikan penerapan syariat di masyarakat, termasuk pengawasan pasar dan kepatuhan terhadap hukum.
- c. Hukum Pidana: a) Hudud: Khilafah menerapkan hukuman hudud untuk kejahatan serius seperti zina, pencurian, dan murtad, dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. b) Qisas dan Diyat: Untuk kasus pembunuhan dan luka-luka, diterapkan hukum qisas (pembalasan setimpal) atau diyat (kompensasi finansial).

Relevansi Konsep Khilafah dalam Konteks Modern

Kritik dan Tantangan: a) Pluralitas dan Demokrasi: Konsep khilafah sering dikritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan pluralisme yang dianut oleh banyak negara modern. b) Hak Asasi Manusia: Penerapan hukum hudud dan qisas dalam khilafah dipandang oleh beberapa pihak bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Adaptasi dan Modernisasi: a) Reformasi Hukum Islam: Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar khilafah dapat diadaptasi dan dimodernisasi untuk sesuai dengan konteks zaman sekarang, seperti penerapan hukum Islam dalam kerangka negara hukum modern yang menghargai hak asasi manusia. b) Integrasi dengan Sistem Politik Modern: Beberapa negara Muslim mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dalam sistem politik modern melalui undang-undang dan kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai Islam (Ali, 1997)

KESIMPULAN

Konsep khilafah dalam bidang politik dan hukum menawarkan sebuah model pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Meskipun menghadapi kritik dan tantangan dalam konteks modern, prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan moralitas yang diusung oleh khilafah tetap relevan untuk dikaji dan diadaptasi. Reformasi hukum Islam dan integrasi dengan sistem politik modern dapat menjadi jalan untuk menerapkan nilai-nilai khilafah dalam konteks yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-khin, Mustafa. 2014. *Konsep Kepemimpinan Dan Jihad Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Muhammudin. 2016. *Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tabrir Indonesia (HTI) dengan Sistem Negara Islam Modern*. Jurnal UIN Raden Fatah Palembang.
- Al-Khudhari, Muhammad. 2004. *Itmaam Al-wafaa'fi Sirat Al-Khulafaa'*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Tahrir, Hizbut. 2006. *struktur negara khilafah* (pemerintahan dan administrasi). penerjemah, yahya A.R, Jakarta: hizbut tahrir.
- Al-baghdadi, Abdurrahman. 1998. *mahfum al-Khilafah wa al-khilafah fi al-hadharah al-islamiyah*. Jakarta.
- A. Athahilah, Rasyid Ridha-Konsep Teotologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar
- As-Salus, Ali. 1997. *Imamah Dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'i*. Jakarta: Gema.